

# POLA MEMILIH MASYARAKAT INDONESIA: SUATU PENDALAMAN TERHADAP PEMILIHAN UMUM 1971, 1977 DAN 1982

SUROSO\*

Tulisan ini dimaksudkan untuk mendalami hasil-hasil tiga kali pemilihan umum yang dilaksanakan dalam masa Orde Baru. Ada tiga pertimbangan di belakangnya, yaitu: pertama, pelaksanaan masing-masing pemilihan umum itu adalah dalam rangka mewujudkan kehidupan politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; kedua, tiga pemilihan umum itu memiliki sistem yang pada dasarnya sama (sistem proporsional yang berdasarkan *lijsten-stelsel*, stelsel daftar); dan pelaksanaan ketiga pemilihan umum itu secara relatif berlangsung dengan tenggang waktu yang sama atau periodik.

Pendalaman terhadap hasil-hasil pemilihan umum tersebut ditujukan untuk memahami pola memilih masyarakat Indonesia, dengan mempergunakan pendekatan agregatif. Disadari sepenuhnya bahwa pendekatan agregatif hanyalah merupakan salah satu pendekatan yang terdapat di dalam khasanah dan perbendaharaan ilmu politik. Setidak-tidaknya terdapat pula pendekatan lain yang mendalami pola memilih masyarakat dari sudut pandang atau aspek individualnya. Namun pendalaman ini dilakukan justru dengan kesadaran bahwa kenyataan pola memilih masyarakat bukan hanya merupakan perilaku individual belaka, tetapi sampai batas tertentu juga mengandung perilaku agregatif.

Pendalaman hasil-hasil pemilihan umum tersebut akan berusaha membahas beberapa hal yang meliputi:

1. perubahan-perubahan penyebaran dari seluruh pemilih terdaftar dalam tiga pemilihan umum;
2. perubahan partisipasi penduduk melalui pemberian suara mereka dalam pemilihan umum;

3. penyebaran pilihan para pemilih terdaftar untuk tingkat nasional dan untuk tiap daerah pemilihan atau daerah tingkat I;
4. perkiraan tentang penyebaran para pemilih terdaftar yang baru;
5. dampak ciri khas partai-partai lama terhadap pola memilih masyarakat.

Dalam perbandingan-perbandingan yang dilakukan, daerah pemilihan Irian Jaya dan Timor Timur tidak diikutsertakan, dengan maksud untuk menjaga kesinambungan dalam data yang diperbandingkan.

### PENYEBARAN PEMILIH TERDAFTAR

Dalam ketiga pemilihan umum terdapat pemilih terdaftarnya masing-masing. Pemilih terdaftar merupakan potensi suara yang tersedia dalam setiap pemilihan umum yang bersangkutan. Menurut unsurnya, pemilih terdaftar adalah sebagian dari keseluruhan penduduk warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain telah genap berusia 17 tahun pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum. Dukungan dari para pemilih terdaftar pada tiap kekuatan sosial-politik merupakan ukuran bagi peta politik dalam masyarakat. Dalam tulisan ini peserta pemilihan umum adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI); dengan catatan bahwa para peserta Pemilihan Umum 1971 yang kemudian berfusi di dalam PPP dihimpun menjadi satu dan demikian pula yang kemudian berfusi di dalam PDI. Dengan adanya tiga peserta dalam pemilihan umum, maka bagi pemilih terdaftar tersedia empat kemungkinan pilihan, yaitu: tiga kemungkinan pilihan yang menjadikan suara pemilih terdaftar secara sah terhimpun sebagai dukungan nyata pada masing-masing dari ketiga peserta pemilihan umum itu dan satu kemungkinan yang menjadikan suara pemilih terdaftar terhimpun dalam suara Tak-sah atau Hangus, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh pemilih terdaftar itu sendiri (lihat Lampiran I).

Penyebaran pemilih terdaftar untuk tiga pemilihan umum bisa dilihat pada Tabel 1. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa secara nominal dan agregatif, pola memilih masyarakat tampak memperlihatkan peningkatan terus-menerus, kecuali untuk pilihan pada PDI yang pada tahun 1977 menurun dibandingkan dengan pada tahun 1971; peningkatan yang tampaknya berarti terjadi pada pilihan Tak-sah/Hangus dari tahun 1971 ke tahun 1977. Tampaknya pola memilih masyarakat pada tahun 1977, dibandingkan dengan tahun 1971, ditandai oleh goyangan yang menguntungkan PPP dan pilihan Tak-sah/Hangus; sedangkan pola memilih masyarakat pada tahun 1982 hanya bergoyang untuk keuntungan Golkar.

Tabel 1

## PENYEBARAN PEMILIH TERDAFTAR DALAM PEMILIHAN UMUM\*

Pilihan	1971 <sup>a</sup>	1977 <sup>b</sup>	1982 <sup>c</sup>
PPP	14.833.942 (25,50%)	18.722.138 (26,70%)	20.850.853 (25,68%)
Golkar	34.348.673 (59,04%)	39.313.354 (56,07%)	47.430.701 (58,43%)
PDI	5.516.894 (9,48%)	5.459.987 (7,79%)	5.890.668 (7,26%)
Tak-sah/Hangus	3.479.736 (5,98%)	6.614.528 (9,43%)	7.003.209 (8,63%)
Total	58.179.245 (100,00%)	70.110.007 (100,00%)	81.175.431 (100,00%)

\* Di luar Irian Jaya dan Timor Timur.

Sumber: <sup>a</sup>Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1971 (Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum, 1972?), hal. 30-33.

<sup>b</sup>Data Hasil Pemilu 1977: Lampiran B (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, 1977), hal. B-3.

<sup>c</sup>Kompas, 15 Juni 1982 dan Suara Karya, 16 Juni 1982.

Masalah yang kemudian timbul adalah: Apakah secara agregatif pola memilih masyarakat Indonesia pada tingkat nasional pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang berarti? Dengan perkataan lain, apakah para pemilih terdaftar tetap teguh berpegang pada pilihannya dalam pemilihan umum yang lebih dahulu di dalam pemilihan umum yang kemudian? Perhitungan di atas kertas pada dua pemilihan umum yang berturut-turut terdapat 16 kemungkinan pilihan untuk para pemilih terdaftar yang terdaftar pada pemilihan umum terdahulu dan terdaftar lagi pada pemilihan umum yang kemudian; sedangkan untuk pemilih terdaftar yang baru pada pemilihan umum yang kemudian tersedia empat kemungkinan pilihan, seperti yang dimiliki oleh para pemilih terdaftar pada pemilihan umum yang terdahulu (lihat Lampiran I). Dalam hal ini soal pokoknya adalah bahwa orang hanya dapat mengetahui jumlah keseluruhan, baik secara nominal maupun secara proporsional, dari pilihan-pilihan para pemilih terdaftar. Karena itu akan dicoba untuk menduga seberapa jauh tetapnya pola dasar dalam memilih di dalam masyarakat Indonesia; untuk itu akan diambil sejumlah anggapan sebagai sarana yang membantu.

Dengan data yang tertera pada Tabel 2, tampak suatu kecenderungan bahwa pemilih terdaftar pada pemilihan umum yang terdahulu cenderung untuk menjadi pemilih terdaftar pula pada pemilihan umum yang kemudian. Secara agregatif hal ini berarti bahwa kemungkinan terdapatnya individu-

pemilihan umum terdahulu menjadi pemilih terdaftar pada pemilihan umum berikutnya tidak disangkal. Pergeseran itu secara agregatif ternyata dapat diabaikan. Tampaknya jumlah pemilih baru yang cukup besar merupakan faktor yang memperkecil dampak yang dimiliki oleh pola memilih secara individual tersebut.

Tabel 2

## PENYEBARAN % PEMILIH TERDAFTAR DALAM PEMILIHAN UMUM\*

Pilihan	1971	(1977-1971)	1977	(1982-1977)	1982
PPP	25,50	(6,68)	32,18	(3,65)	35,83
Golkar	59,04	(8,53)	67,57	(13,96)	81,53
PDI	9,48	(-0,08)	9,40	(0,73)	10,13
Tak-sah/Hangus	5,98	(5,38)	11,36	(0,68)	12,04
Total	100,00	(20,51)	120,51	(19,02)	139,53

\* Di luar Irian Jaya dan Timor Timur, jumlah pemilih terdaftar pada Pemilihan Umum 1971 dianggap = 100%.

Sumber: *Idem*.

Dengan mengambil anggapan bahwa pemilih terdaftar yang lama terdaftar kembali pada pemilihan umum berikutnya dan mereka tetap pada pilihannya, maka dapat didalami perubahan yang terjadi dengan pola memilih masyarakat. Sehubungan dengan anggapan kedua, patut dikemukakan catatan bahwa hal ini berarti secara agregatif besarnya goyangan dari pilihan lama tertentu menjadi pilihan-pilihan yang baru lainnya sama dengan besarnya goyangan dari pilihan-pilihan lama yang lain menjadi pilihan tertentu yang baru. Disadari pula bahwa hal ini berarti hanya memperhatikan empat kemungkinan dari 16 kemungkinan yang terdapat menurut perhitungan di atas kertas (lihat Lampiran I).

PPP memperoleh keuntungan relatif lebih besar pada tahun 1977 terhadap tahun 1971 daripada pada tahun 1982 terhadap tahun 1977. Tampaknya hal ini merupakan petunjuk bahwa antara 1971 dan 1977 pola masyarakat dalam memilih bergoyang sehingga menguntungkan PPP; sedangkan antara 1977 dan 1982 pola masyarakat dalam memilih tidak begitu menguntungkannya, meskipun tidak sampai merugikannya. Golkar memperoleh keuntungan rela-

hadap tahun 1971. Tampaknya hal ini merupakan petunjuk bahwa antara 1971 dan 1977 pola masyarakat dalam memilih tidak begitu menguntungkan-nya, meskipun tidak sampai merugikannya; sedangkan antara 1977 dan 1982 pola masyarakat dalam memilih bergoyang sehingga menguntungkan Golkar. PDI menderita kerugian pada tahun 1977 bila dibandingkan dengan tahun 1971, tetapi berhasil memperoleh keuntungan pada tahun 1982 baik terhadap tahun 1977 maupun terhadap tahun 1971. Tampaknya hal ini menunjukkan bahwa antara tahun 1971 dan tahun 1977 pola memilih masyarakat bergoyang sehingga merugikan PDI, di antara tahun 1977 dan tahun 1982 pola memilih masyarakat terjadi goyangan yang menguntungkannya. Tetapi bergoyangnya pola memilih ini kurang berarti karena proporsi relatif PDI dalam Pemilihan Umum 1977 dan 1982 terus menurun.

Pilihan Tak-sah/Hangus mendapat keuntungan lebih besar pada tahun 1977 terhadap tahun 1971 daripada pada tahun 1982 terhadap tahun 1977. Tampaknya hal ini menunjukkan bahwa di satu pihak pola memilih masyarakat secara berarti sekali bergoyang sehingga sangat memperbesar jumlah/proporsi suara tak sah dalam Pemilihan Umum tahun 1977. Apabila selisih antara pemilih terdaftar pada tahun 1971 dengan pemilih terdaftar pada tahun 1977 dianggap sebagai pemilih baru pada tahun 1977, maka dapat dikatakan bahwa sebesar 26,23% dari pemilih terdaftar yang baru (5,38% dari 20,51%), dengan sengaja ataupun tidak, menjadikan suara mereka Tidak-sah atau Hangus. Di lain pihak antara tahun 1977 dan tahun 1982 bergoyangnya pola memilih masyarakat memang memperbesar proporsi suara Tidak-sah/Hangus, tetapi secara relatif tidak berarti. Apabila selisih antara pemilih terdaftar pada tahun 1977 dan pemilih terdaftar pada tahun 1982 dengan pemilih terdaftar pada tahun 1977 dianggap sebagai pemilih baru pada tahun 1982, maka dapat dikatakan bahwa para pemilih baru ini cenderung memberikan suara mereka secara sah; sebab tambahan suara tidak-sah dari para pemilih terdaftar yang baru hanya sebesar 3,57% (0,68% dari 19,02%) saja.

## PARTISIPASI RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM

Tabel 3 memberikan beberapa keterangan mengenai latar belakang demografis dari Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, dan 1982 yang lalu.

Dua hal tampak di balik data pada Tabel 3. Pertama sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk warga negara, maka jumlah pemilih terdaftar dan jumlah suara sah meningkat pula -- baik secara nominal maupun secara relatif. Kedua, secara proporsional perbandingan antara suara sah terhadap pemilih terdaftar tampak tinggi sekali, ketiga-tiganya di atas 90%; namun ter-

Tabel 3

## PARTISIPASI RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM\*

Keterangan	1971	1977	1982
1. Penduduk warga negara	114.190.218	128.808.106	144.750.966
2. Pemilih terdaftar	58.179.245	70.110.007	81.173.431
3. Suara sah	54.699.549	63.495.479	74.172.222
4. % (2)/(1)	50,95%	54,43%	56,08%
5. % (3)/(1)	47,90%	49,29%	51,24%
6. % (3)/(2)	94,02%	90,57%	91,37%

\* Di luar Irian Jaya dan Timor Timur.

Sumber: *Idem*.

mengenai pola memilih masyarakat sehubungan dengan penurunan proporsi suara sah ini telah dikemukakan di bagian sebelumnya.

Tingginya proporsi suara sah terhadap pemilih terdaftar, yang bisa dipandang sebagai pertanda besarnya partisipasi rakyat dalam tiga pemilihan umum, justru mengundang munculnya pertanyaan baru. Apakah partisipasi rakyat itu merata di seluruh daerah pemilihan atau daerah tingkat I?

Untuk dapat menangkap proporsi suara sah terhadap pemilih terdaftar secara tepat bagi pendalaman pola memilih masyarakat, perlu dikemukakan bahwa antara saat pendaftaran pemilih dengan saat pencoblosan surat suara terdapat kemungkinan perpindahan penduduk warga negara dan dengan demikian juga kemungkinan perpindahan pemilih terdaftar dari daerah pemilihan yang satu ke daerah pemilihan yang lain. Dalam Tabel 4 hal ini masih tampak untuk daerah pemilihan Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Umum 1977 dan 1982. Dengan catatan itu, masih terlihat hal-hal yang menarik. Pertama, partisipasi rakyat dalam memilih pada tahun 1971 berada pada proporsi di atas 90% di 24 daerah pemilihan; hanya di daerah pemilihan DKI Jakarta sajarah partisipasi rakyat dalam memilih mempunyai proporsi sebesar 87,99%, artinya: sebesar 12,01% dari pemilih terdaftar dengan sengaja atau tidak sengaja menjadikan suaranya terhimpun dalam pilihan Tak-sah/ Hangus. Tampaknya hal ini untuk sebagian memperlihatkan dampak dari kegiatan-kegiatan yang menamakan diri Golongan Putih pada tahun 1971 terhadap masyarakat pemilih di daerah pemilihan DKI Jakarta yang merupa-

Tabel 4  
**PROPORSI SUARA SAH TERHADAP PEMILIH TERDAFTAR  
 DALAM TIAP DAERAH PEMILIHAN\***

Daerah Pemilihan	1971	1977	1982
1. DI Aceh	94,21	91,71	92,67
2. Sumatera Utara	93,42	92,27	93,34
3. Sumatera Barat	91,75	88,96	87,88
4. Riau	93,57	88,02	92,51
5. Sumatera Selatan	91,00	85,19	90,12
6. Jambi	94,29	94,75	96,97
7. Bengkulu	94,84	92,72	89,77
8. Lampung	95,70	93,61	91,17
9. Jawa Barat	95,52	93,64	90,46
10. DKI Jakarta	87,99	88,48	89,70
11. Jawa Tengah	93,32	84,06	91,08
12. DI Yogyakarta	93,16	89,32	88,14
13. Jawa Timur	93,81	92,63	89,89
14. Kalimantan Barat	94,18	93,28	92,16
15. Kalimantan Tengah	95,90	93,60	98,91
16. Kalimantan Selatan	93,20	86,34	93,30
17. Kalimantan Timur	91,50	82,70	85,64
18. Sulawesi Utara	96,29	94,26	97,01
19. Sulawesi Tengah	96,06	92,98	97,87
20. Sulawesi Tenggara	98,96	100,10	101,51
21. Sulawesi Selatan	96,19	95,86	90,77
22. Bali	94,96	89,98	94,45
23. Nusa Tenggara Barat	94,66	83,67	90,65
24. Nusa Tenggara Timur	97,62	97,02	98,28
25. Maluku	95,60	94,55	94,79
Total	94,02	90,57	91,37

\* Di luar Irian Jaya dan Timor Timur.

Sumber: *Idem*.

Kedua, partisipasi rakyat dalam memilih pada tahun 1977 berada pada proporsi di atas 90% di 15 daerah pemilihan, dan di bawah proporsi itu pada 10 daerah pemilihan. Dengan kata lain, proporsi pemilih terdaftar yang dengan sengaja atau tidak sengaja menjadikan suaranya terhimpun dalam pilihan Tak-sah/Hangus yang di atas 10% berasal dari daerah-daerah pemilihan Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Nusa Tenggara

Ketiga, partisipasi rakyat dalam memilih pada tahun 1982 berada pada proporsi di atas 90% di 19 daerah pemilihan, dan di bawah proporsi itu pada 6 daerah pemilihan. Dengan kata lain, proporsi pemilih terdaftar yang dengan sengaja atau tidak sengaja menjadikan suaranya terhimpun dalam pilihan Tak-sah/Hangus yang di atas 10% berasal dari daerah-daerah pemilihan Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Keempat, apabila Tabel 4 dibandingkan secara horisontal dan perbedaan sebesar 3,0% dianggap berarti secara agregatif, maka tampak bahwa:

- a. proporsi suara sah terhadap pemilih terdaftar mengalami penurunan yang berarti antara tahun 1971 dan tahun 1977 di daerah-daerah pemilihan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Bali dan Nusa Tenggara Barat;
- b. proporsi suara sah terhadap pemilih terdaftar mengalami penurunan yang berarti antara tahun 1977 dan 1982 di daerah-daerah pemilihan Jawa Barat dan Sulawesi Selatan; selain itu juga terjadi peningkatan proporsi suara sah terhadap pemilih terdaftar di daerah-daerah pemilihan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Dengan memperhatikan besarnya proporsi suara sah terhadap pemilih terdaftar dan peningkatan/penurunannya dalam tiga pemilihan umum, dapat disusun pengelompokan sebagai berikut:

1. Daerah-daerah pemilihan DI Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan Maluku ditandai oleh proporsi suara sah terhadap pemilih terdaftar yang berada di atas 90% dan tanpa peningkatan/penurunan proporsi itu secara berarti. Hal ini tampaknya berarti bahwa masyarakat di daerah-daerah pemilihan ini memiliki pola memilih yang ditandai oleh pemakaian hak memilih mereka secara berturut-turut dalam tiga pemilihan umum dan selisih antara bergesernya suara sah menjadi suara Tak-sah/Hangus dengan bergesernya suara Tak-sah/Hangus menjadi suara sah ternyata tidak berarti;
2. Daerah-daerah pemilihan Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan ditandai oleh proporsi suara sah terhadap pemilih terdaftar yang berada di atas 90% dengan peningkatan/penurunan proporsi itu secara berarti. Hal ini tampaknya berarti bahwa masyarakat di daerah-daerah pemilihan ini memiliki pola memilih yang ditandai oleh pemakaian hak memilih mereka secara berturut-turut dalam tiga pemilihan



Hangus dengan bergesernya suara Tak-sah/Hangus menjadi suara sah ternyata cukup berarti;

3. Daerah-daerah pemilihan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Barat pernah sekali ditandai oleh proporsi suara sah terhadap pemilih terdaftar di bawah 90% dengan atau tanpa penurunan/peningkatan proporsi itu secara berarti. Hal ini tampaknya berarti bahwa masyarakat di daerah-daerah pemilihan ini mempunyai pola pemilih yang ditandai oleh pemakaian hak memilih tidak secara berturut-turut dalam tiga pemilihan umum. Selisih antara bergesernya suara sah menjadi suara Tak-sah/Hangus dengan bergesernya suara Tak-sah/Hangus menjadi suara sah ternyata cukup berarti di daerah-daerah pemilihan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Barat;
4. Daerah-daerah pemilihan Sumatera Barat, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur dua kali ditandai oleh proporsi suara sah terhadap pemilih terdaftar di bawah 90% dengan atau tanpa penurunan proporsi itu. Hal ini tampaknya berarti bahwa masyarakat di daerah-daerah pemilihan ini mempunyai pola memilih yang ditandai oleh pemakaian hak memilih tidak secara berturut-turut dalam tiga pemilihan umum. Selisih antara bergesernya suara sah menjadi suara Tak-sah/Hangus dengan bergesernya suara Tak-sah/Hangus menjadi suara sah ternyata cukup berarti untuk daerah pemilihan DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur;
5. Daerah pemilihan DKI Jakarta tiga kali ditandai oleh proporsi suara sah terhadap pemilih terdaftar di bawah 90%. Kiranya hal ini berarti bahwa masyarakat di daerah pemilihan DKI Jakarta mempunyai pola memilih yang khas karena secara berturut-turut lebih dari 10% pemilih terdaftar dengan sengaja/tidak sengaja menjadikan suaranya terhimpun dalam pilihan Tak-sah/Hangus. Namun demikian, dalam tiga kali pemilihan umum tidak terjadi penurunan/peningkatan proporsi itu secara berarti.

## PENYEBARAN PILIHAN PARA PEMILIH TERDAFTAR

Penyebaran pilihan para pemilih terdaftar dan perinciannya untuk tiap daerah pemilihan dapat dilihat dalam Tabel 5. Beberapa hal yang tampak dari tabel itu adalah sebagai berikut:

- a. PPP memperoleh proporsi di atas 25% dari pemilih terdaftar pada tahun 1971 di daerah-daerah pemilihan: DI Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur; pada tahun 1977 di daerah-daerah pemilihan: DI Aceh,

## PENYEBARAN % PEMILIH TERDAFTAR DALAM PEMILIHAN UMUM\*

1977

1978

## Daerah Pemilihan

	(a)	(b)	(c)	(d)	(a)	(b)	(c)	(d)	(a)	(b)	(c)	(d)
1. DI Aceh	46,05	46,83	1,32	5,79	52,52	37,75	1,44	8,29	54,75	34,26	3,66	7,33
2. Sumatera Utara	14,78	65,52	13,12	6,58	20,50	61,32	10,45	7,73	19,08	67,71	6,54	6,66
3. Sumatera Barat	31,68	58,00	2,06	8,25	28,87	59,16	0,93	11,04	34,07	53,08	0,73	12,12
4. Riau	19,24	71,79	2,54	6,43	29,86	55,74	2,42	11,98	23,86	66,32	2,33	7,49
5. Sumatera Selatan	27,35	56,98	6,67	9,00	36,31	42,44	6,44	14,81	34,29	50,49	5,33	9,88
6. Jambi	9,81	83,17	1,30	5,71	14,84	79,11	0,80	5,25	13,39	82,23	1,35	3,03
7. Bengkulu	14,65	78,42	1,74	5,19	20,27	70,88	1,57	7,28	23,47	63,39	2,90	10,23
8. Lampung	21,10	68,74	5,86	4,30	28,82	57,89	6,90	6,39	27,37	54,12	9,68	8,82
9. Jawa Barat	19,74	72,72	3,06	4,48	26,72	62,06	4,86	6,36	24,57	57,28	8,59	9,56
10. DKI Jakarta	30,67	41,07	16,26	12,00	38,46	34,75	15,27	11,52	36,04	41,36	14,53	8,07
1. Jawa Tengah	26,81	46,95	19,55	6,68	23,77	44,24	16,05	15,94	25,25	55,08	10,75	8,92
2. DI Yogyakarta	20,01	59,01	14,14	6,84	20,75	50,54	18,03	10,68	20,58	53,37	14,19	11,86
3. Jawa Timur	36,82	51,51	5,47	6,19	33,39	54,50	4,73	7,37	32,93	51,04	5,92	10,11
4. Kalimantan Barat	17,64	62,78	13,75	5,82	20,36	64,25	8,67	6,72	10,11	65,42	7,63	7,84
5. Kalimantan Tengah	15,73	78,08	2,07	4,12	24,93	65,38	3,28	6,40	14,39	83,31	1,21	1,09
6. Kalimantan Selatan	31,63	60,42	1,14	6,80	42,66	42,81	0,87	13,66	36,99	55,28	1,03	6,70
7. Kalimantan Timur	27,56	50,12	13,82	8,49	29,29	47,11	6,30	17,30	27,28	52,50	5,87	14,35
8. Sulawesi Utara	22,06	58,47	15,76	3,71	16,61	68,70	8,95	5,74	6,56	84,52	5,93	2,99
9. Sulawesi Tengah	18,22	73,80	4,03	3,95	17,93	73,74	1,31	7,02	15,19	79,57	3,18	2,06
10. Sulawesi Tenggara	5,72	91,39	1,72	1,17	3,13	96,20	0,77	.....	2,60	98,41	0,50	.....
1. Sulawesi Selatan	18,07	75,37	2,74	3,81	13,43	81,66	0,77	4,14	9,80	85,45	0,56	4,18
2. Bali	2,00	78,64	14,15	5,20	1,48	76,81	11,69	10,02	1,83	83,45	9,17	5,55
3. Nusa Tenggara Barat	23,42	66,09	5,14	5,34	30,65	48,10	4,91	16,33	25,52	62,19	2,93	9,35
4. Nusa Tenggara Timur	3,06	60,03	34,52	2,37	1,89	87,59	7,54	2,98	1,27	94,69	2,31	1,72
5. Maluku	23,83	45,58	26,18	4,40	17,99	67,94	8,62	5,45	17,98	71,33	5,49	5,20
Total	25,49	59,04	9,48	5,99	26,70	56,07	7,79	9,42	25,69	58,43	7,26	8,62

Di luar Irian Jaya dan Timor Timur; (a) = PPP; (b) = Golkar; (c) = PDI; (d) = Tak-sah/Hangus.  
 \*Malah pemilih terdaftar pada masing-masing tahun pemilihan umum = 100%.

Sumber: Ident.

- Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat; pada tahun 1982 di daerah-daerah pemilihan: DI Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian antara tahun 1971 dan tahun 1977 tampaknya PPP memperoleh keuntungan dari bergoyangnya pola memilih masyarakat di daerah-daerah Riau, Lampung, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, tetapi menderita kerugian di daerah pemilihan Jawa Tengah. Sedangkan antara tahun 1977 dan tahun 1982 tampaknya PPP memperoleh keuntungan di daerah pemilihan Jawa Tengah dan menderita kerugian di daerah-daerah pemilihan Riau dan Jawa Barat;
- b. Golkar memperoleh proporsi di atas 50% dari pemilih terdaftar pada tahun 1971 di daerah-daerah pemilihan: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat; pada tahun 1977 di daerah-daerah pemilihan: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku; pada tahun 1982 di daerah-daerah pemilihan: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Dengan demikian antara tahun 1971 dan 1977 tampaknya Golkar menderita kerugian di daerah Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dan memperoleh keuntungan dari bergoyangnya pola memilih masyarakat di daerah pemilihan Maluku. Sedangkan antara tahun 1977 dan tahun 1982 tampaknya Golkar memperoleh keuntungan dari bergoyangnya pola memilih masyarakat di daerah pemilihan Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat;
- c. PDI memperoleh proporsi di atas 9% dari pemilih terdaftar pada tahun 1971 di daerah-daerah pemilihan: Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku; pada tahun 1977 di daerah-daerah pemilihan: Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Bali; pada tahun 1982 di daerah-daerah pemilihan: Lam-

kian antara tahun 1971 dan tahun 1977 tampaknya PDI menderita kerugian dari bergoyangnya pola memilih masyarakat di daerah-daerah pemilihan: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Sedangkan antara tahun 1977 dan tahun 1982 tampaknya PDI memperoleh keuntungan dari bergoyangnya pola memilih masyarakat di daerah pemilihan Lampung, tetapi menderita kerugian di daerah pemilihan Sumatera Utara.

Dalam tiga kali pemilihan umum ternyata bahwa PPP terus-menerus mendapat dukungan di atas 25% dari pemilih terdaftar di daerah-daerah pemilihan: DP Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur; di antaranya yang sangat menonjol adalah di daerah pemilihan DI Aceh, karena di sana PPP secara berturut-turut menempati urutan yang paling atas, bahkan dua kali berturut-turut mendapatkan proporsi di atas 50% dari pemilih terdaftar. Dan di daerah-daerah pemilihan Lampung, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, pola memilih masyarakat bergoyang-goyang untuk keuntungan atau kerugian PPP. Daerah-daerah pemilihan yang lain ditandai oleh dukungan di bawah 25% bagi PPP.

Demikian pula dalam tiga pemilihan umum ternyata Golkar terus-menerus mendapat dukungan di atas 50% dari pemilih terdaftar di daerah-daerah pemilihan: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Timur. Dan di daerah-daerah pemilihan Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Maluku bergoyang-goyang untuk keuntungan atau kerugian Golkar. Dan di daerah-daerah pemilihan DI Aceh dan DKI Jakarta, Golkar terus-menerus memperoleh di bawah 50%.

Dalam tiga pemilihan umum ternyata PDI mendapatkan proporsi di atas 9% dari pemilih terdaftar secara terus-menerus di daerah-daerah pemilihan DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Bali. Pola memilih masyarakat di daerah-daerah pemilihan Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Maluku bergoyang untuk keuntungan atau kerugian PDI. Daerah-daerah pemilihan yang lain ditandai oleh dukungan pemilih terdaftar sebesar di bawah 9% bagi PDI.

Secara horisontal, Tabel 5 juga memperlihatkan beberapa hal berikut:

a. PPP mendapat dukungan yang terus meningkat dari pemilih terdaftar di

- alami penurunan di daerah-daerah pemilihan Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Sedangkan di 16 daerah pemilihan yang lain ditandai oleh goyangan naik kemudian turun ataupun turun kemudian naik bagi PPP;
- b. Golkar terus-menerus memperoleh dukungan yang meningkat dari pemilih terdaftar di daerah-daerah pemilihan Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku; tetapi Golkar terus-menerus mengalami penurunan di daerah-daerah pemilihan DI Aceh, Bengkulu, Lampung dan Jawa Barat. Sedangkan di 15 daerah pemilihan yang lain di tandai oleh goyangan naik kemudian turun ataupun turun kemudian naik bagi Golkar;
- c. PDI mendapatkan dukungan yang terus meningkat dari pemilih terdaftar di daerah pemilihan DI Aceh, Lampung dan Jawa Barat; tetapi terus-menerus mengalami penurunan di daerah-daerah pemilihan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Sedangkan di delapan daerah pemilihan yang lain ditandai oleh goyangan baik dari naik kemudian turun ataupun dari turun kemudian naik bagi PDI.

Kiranya hal-hal di atas, apabila diperbandingkan dengan pola memilih masyarakat pada tingkat nasional -- di luar Irian Jaya dan Timor Timur -- justru memperlihatkan adanya perbedaan pola memilih masyarakat untuk setiap daerah pemilihan. PPP, misalnya, untuk seluruh Indonesia di luar Irian Jaya dan Timor Timur, mengalami peningkatan terus-menerus; tetapi pada tataran daerah pemilihan, peningkatan secara terus-menerus ini hanya terjadi pada daerah-daerah pemilihan DI Aceh dan Bengkulu. PDI secara nasional terus-menerus mengalami penurunan, tetapi justru memperoleh peningkatan terus-menerus di daerah pemilihan Lampung dan Jawa Barat serta mendapat peningkatan di daerah pemilihan DI Aceh tetapi tidak berarti karena PPP justru mendapatkan peningkatan yang lebih besar. Sedangkan Golkar terus-menerus mendapat di atas 50% pada tingkat nasional di luar Irian Jaya dan Timor Timur, dengan penurunan antara tahun 1977 dan 1971; tetapi dukungan pemilih terdaftar padanya di atas 50% berubah-ubah dari 21 daerah pemilihan pada tahun 1971 menjadi 18 daerah pemilihan dan kemudian menjadi 23 daerah pemilihan pada tahun 1982. Kiranya hal ini berarti bahwa secara

pada Golkar, meskipun dengan perubahan-perubahan pada beberapa daerah pemilihan.

Apabila pilihan-pilihan para pemilih terdaftar dalam pemilihan umum yang terdahulu dianggap tetap untuk pemilihan umum berikutnya, maka dapat disusun Tabel 6.

Tabel 6

% PENINGKATAN/PENURUNAN RELATIF PENYEBARAN PEMILIH TERDAFTAR  
DALAM PEMILIHAN UMUM\*

Daerah Pemilihan	1977-1971 <sup>a</sup>				1982-1977 <sup>b</sup>			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. DI Aceh	16,10	-2,16	0,38	4,02	10,78	1,88	2,79	0,18
2. Sumatera Utara	11,13	11,97	0,09	3,19	2,76	21,21	-2,48	0,39
3. Sumatera Barat	3,38	13,84	-0,93	5,16	9,77	1,05	-0,10	2,71
4. Riau	18,41	-1,51	0,51	8,67	0,70	29,21	0,56	-2,39
5. Sumatera Selatan	18,54	-3,34	1,47	9,72	6,81	21,05	0,26	-2,39
6. Jambi	9,30	18,69	-0,27	1,05	1,82	23,18	0,88	-1,48
7. Bengkulu	10,67	10,13	0,22	3,90	11,98	16,24	2,41	6,78
8. Lampung	20,42	14,67	4,08	4,91	7,47	13,86	5,93	5,30
9. Jawa Barat	12,80	2,86	2,86	3,26	2,15	5,24	5,23	4,87
10. DKI Jakarta	18,17	3,06	3,13	2,63	7,63	18,15	3,31	-1,20
11. Jawa Tengah	1,15	5,10	-0,67	12,07	4,31	17,01	-4,10	-6,02
12. DI Yogyakarta	4,39	0,42	7,06	5,72	2,20	8,97	-2,21	2,54
13. Jawa Timur	2,55	12,75	0,11	2,50	3,20	2,21	1,85	3,86
14. Kalimantan Barat	7,17	15,50	-3,19	2,37	3,94	18,95	1,03	3,25
15. Kalimantan Tengah	15,06	2,67	1,98	3,78	-7,03	38,28	-1,77	-5,04
16. Kalimantan Selatan	17,23	-11,39	-0,14	8,84	0,91	22,30	0,34	-5,77
17. Kalimantan Timur	17,68	22,64	-4,09	18,23	3,73	16,43	0,80	0,07
18. Sulawesi Utara	-1,66	25,89	-4,77	3,34	-8,96	29,89	-2,03	-2,25
19. Sulawesi Tengah	4,97	21,57	-2,34	5,13	0,31	21,81	2,51	-4,55
20. Sulawesi Tenggara	-2,02	22,29	-0,81	.....	-0,02	20,35	-0,17	.....
21. Sulawesi Selatan	-3,10	15,66	-1,88	0,80	-1,93	18,65	-0,11	0,77
22. Bali	-0,25	12,00	-0,36	6,62	0,54	15,40	-1,56	-3,89
23. Nusa Tenggara Barat	12,30	-10,04	0,58	13,69	-2,06	21,58	-1,63	-5,85
24. Nusa Tenggara Timur	-0,89	40,40	-25,88	1,05	-0,48	17,56	-4,96	-1,07
25. Maluku	-2,17	36,21	-15,80	2,16	2,94	15,12	-2,23	0,60
Total	6,69	8,53	-0,09	5,36	3,20	12,72	0,68	0,62

\* Di luar Irian Jaya dan Timor Timur; (1) = PPP; (2) = Golkar; (3) = PDI (4) = Tak-sah/Hangus

<sup>a</sup> Pemilih terdaftar tahun 1971 = 100%; pilihan mereka untuk tahun 1977 dianggap tetap seperti tahun 1971.

<sup>b</sup> Pemilih terdaftar tahun 1977 = 100%; pilihan mereka untuk tahun 1982 dianggap tetap seperti tahun 1977.

Dalam Tabel 6 itu tampak bahwa antara tahun 1971 dan tahun 1977 PPP mengalami penurunan di daerah-daerah pemilihan: Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku; sedangkan Golkar mengalami penurunan di daerah-daerah pemilihan: DI Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat; dan PDI mengalami penurunan di daerah-daerah pemilihan: Sumatera Barat, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Dalam pada itu pilihan Tak-sah/Hangus mengalami peningkatan di 25 daerah pemilihan; secara nasional di luar Irian Jaya dan Timor Timur bertambah sebesar 26% (5,36% dari 20,49%) dan bertambah lebih dari 20% untuk daerah-daerah pemilihan DI Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Antara tahun 1977 dan tahun 1982 PPP mengalami penurunan di daerah-daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Golkar mendapatkan peningkatan di 25 daerah pemilihan; sedangkan PDI mengalami penurunan di daerah-daerah pemilihan: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Maluku. Dalam pada itu pilihan Tak-sah/Hangus mengalami penurunan di daerah-daerah pemilihan: Riau, Sumatera Selatan, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Peningkatan pilihan Tak-sah/Hangus yang berarti adalah di daerah-daerah pemilihan: Sumatera Barat, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.

Hal-hal di atas berarti bahwa antara dua kali pemilihan umum terdapat sebagian dari pemilih terdaftar dalam pemilihan umum yang terdahulu yang kemudian bergoyang pilihannya dalam pemilihan umum berikutnya. Antara tahun 1971 dan tahun 1977 goyangan tersebut adalah sebagai berikut: sebagian dari pemilih PPP dalam tahun 1971 ternyata kemudian meninggalkan PPP atau tidak memberikan pilihannya pada PPP lagi pada tahun 1977, yaitu dari daerah-daerah pemilihan Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku; sebagian dari pemilih Golkar pada tahun 1971 ternyata kemudian tidak memilih Golkar lagi dalam tahun 1977, yaitu daerah-daerah pemilihan DI Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat; dan sebagian dari pemilih PDI

yaitu dari daerah-daerah pemilihan Sumatera Barat, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Antara tahun 1977 dan 1982 goyangan para pemilih terdaftar adalah sebagai berikut: sebagian dari pemilih PPP pada tahun 1977 ternyata kemudian tidak memilih PPP pada tahun 1982 di daerah-daerah pemilihan: Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; sebagian dari pemilih PDI pada tahun 1977 ternyata kemudian tidak memilih PDI lagi dalam tahun 1982 di daerah-daerah pemilihan: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Maluku; dan sebagian pemilih terdaftar pada tahun 1977 yang dahulu secara sengaja ataupun tidak sengaja memberikan suara mereka untuk pilihan Tak-sah/Hangus ternyata kemudian dalam tahun 1982 memberikan suara mereka, yaitu dari daerah-daerah pemilihan: Riau, Sumatera Selatan, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Dengan demikian goyangan-goyangan dalam pola memilih masyarakat yang terjadi antara tahun 1971 dan tahun 1977 dan yang tidak sampai merugikan keempat kemungkinan pilihan, hanya terjadi di daerah-daerah pemilihan: Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah; sedangkan antara tahun 1977 dan tahun 1982, hanya terjadi di daerah-daerah pemilihan: DI Aceh, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Dengan demikian goyangan-goyangan pola memilih masyarakat dalam tiga kali pemilihan umum yang tidak sampai merugikan keempat kemungkinan pilihan, hanya terjadi di daerah-daerah pemilihan: Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sedangkan antara tahun 1971 dan tahun 1977 tidak terdapat goyangan yang merugikan pilihan Tak-sah/Hangus; tetapi antara tahun 1977 dan tahun 1982 terdapat goyangan yang merugikan pilihan Tak-sah/Hangus saja di daerah-daerah pemilihan: Riau, Sumatera Selatan, Jambi, DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan.

## PENYEBARAN PARA PEMILIH TERDAFTAR YANG BARU

Apabila selisih antara pemilih terdaftar dalam pemilihan umum yang terdahulu dengan pemilih terdaftar yang berikutnya dianggap sebagai pemilih terdaftar yang baru maka untuk masing-masing daerah pemilihan tampaknya



- a. Di daerah pemilihan DI Aceh, pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih terutama pada PPP dan hanya sebagian kecil saja dari mereka yang tampaknya memberikan pilihannya pada PDI atau pilihan Tak-sah/Hangus; sedangkan sebagian dari pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1971 memilih Golkar tampaknya cenderung memberikan suara mereka, dengan sengaja atau tidak sengaja, pada pilihan Tak-sah/Hangus daripada memilih PPP atau PDI. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih terutama pada PPP, kemudian sebagian kecil pada PDI, Golkar, dan pilihan Tak-sah/Hangus;
- b. Di daerah pemilihan Sumatera Utara, pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih terutama pada Golkar dan PPP dalam proporsi yang hampir berimbang, dan hanya sebagian kecil saja yang memberikan suara mereka pada pilihan Tak-sah/Hangus dan sebagian amat kecil memberikan pilihannya pada PDI. Para pemilih baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih terutama pada Golkar, dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil memberikan pilihan pada PPP dan pilihan Tak-sah/Hangus; tampaknya sebagian pemilih terdaftar tahun 1977 yang pada tahun 1977 memberikan pilihannya pada PDI bergoyang dari pilihannya sehingga mungkin menjadi memilih Golkar pada tahun 1982;
- c. Di daerah pemilihan Sumatera Barat, pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar, kemudian dalam proporsi yang lebih kecil pada pilihan Tak-sah/Hangus dan pada PPP; sebagian pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1971 memilih PDI ternyata bergoyang dari pilihannya, sehingga tampaknya kemudian menjadikan suara mereka terhimpun dalam pilihan Tak-sah/Hangus. Pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada PPP dan dalam proporsi yang lebih kecil kemudian pada pilihan Tak-sah/Hangus, disusul kemudian pada Golkar; sebagian pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1977 memilih PDI ternyata bergoyang dari pilihannya, sehingga tampaknya mereka menjadikan suaranya terhimpun dalam pilihan Tak-sah/Hangus;
- d. Di daerah pemilihan Riau, pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih terutama pada PPP, dan kemudian pada proporsi yang lebih kecil pada pilihan Tak-sah/Hangus serta dalam proporsi yang jauh lebih kecil lagi pada PDI; sedangkan sebagian dari pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1971 memilih Golkar tampaknya cenderung memberikan suara mereka pada pilihan Tak-sah/Hangus. Para pemilih terdaftar baru dalam tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih terutama

PPP dan PDI; sedangkan sebagian dari pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1977 memberikan suaranya pada pilihan Tak-sah/Hangus ternyata bergoyang pilihannya, sehingga menguntungkan Golkar dan/atau PPP dan/atau PDI;

e. Di daerah pemilihan Sumatera Selatan, pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih terutama pada PPP, dan dalam proporsi yang lebih kecil kemudian pada pilihan Tak-sah/Hangus dan dalam proporsi yang jauh lebih kecil lagi pada PDI; sedangkan sebagian dari pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1971 memilih Golkar tampaknya cenderung memberikan suaranya pada pilihan Tak-sah/Hangus dan/atau pada PDI. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih terutama pada Golkar, dan kemudian pada proporsi yang lebih kecil pada PPP serta dengan proporsi yang lebih kecil lagi pada PDI; sedangkan sebagian dari para pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1977 memberikan suaranya pada pilihan Tak-sah/Hangus dalam tahun 1982 ternyata bergoyang dari pilihannya, sehingga menguntungkan Golkar dan/atau PPP dan/atau PDI;

f. Di daerah pemilihan Jambi, pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih terutama pada Golkar, kemudian dalam proporsi yang lebih kecil pada PPP dan pilihan Tak-sah/Hangus; sedangkan sebagian dari pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1971 memilih PDI ternyata bergoyang pilihannya sehingga mungkin memberikan suaranya pada pilihan Tak-sah/Hangus atau pada PPP atau pada Golkar. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih terutama pada Golkar dan kemudian pada proporsi yang jauh lebih kecil pada PPP dan PDI; sedangkan sebagian dari pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1977 memberikan suaranya pada pilihan Tak-sah/Hangus ternyata bergoyang dari pilihannya itu, sehingga menguntungkan Golkar dan/atau PPP dan/atau PDI;

g. Di daerah pemilihan Bengkulu, pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung mempunyai pola memilih pada PPP dan Golkar dalam proporsi yang hampir berimbang, dan kemudian dalam proporsi yang lebih kecil pada pilihan Tak-sah/Hangus serta dalam proporsi yang jauh lebih kecil lagi pada PDI. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar, kemudian dalam proporsi yang lebih kecil pada PPP, dan dalam proporsi yang lebih kecil lagi pada pilihan Tak-sah/Hangus dan PDI;

h. Di daerah pemilihan Lampung, pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung mempunyai pola memilih pertama-tama pada PPP, dan kemudian dalam proporsi yang lebih kecil berturut-turut pada Golkar, pilihan

cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar, dan kemudian dalam proporsi yang lebih kecil berturut-turut pada PPP, PDI, dan pilihan Tak-sah/Hangus;

- i. Di daerah pemilihan Jawa Barat, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung mempunyai pola memilih terutama pada PPP, dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil berturut-turut pada pilihan Tak-sah/Hangus, Golkar dan PDI. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung mempunyai pola memilih pertama-tama pada Golkar dan PDI serta pilihan Tak-sah/Hangus dalam proporsi yang hampir seimbang, dan kemudian dalam proporsi yang lebih kecil pada PPP;
- j. Di daerah pemilihan DKI Jakarta, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung mempunyai pola memilih pertama-tama pada PPP, dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil dan hampir seimbang pada PDI, Golkar, dan pilihan Tak-sah/Hangus. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung mempunyai pola memilih pertama-tama pada Golkar, dan kemudian pada proporsi yang lebih kecil pada PPP serta dalam proporsi yang lebih kecil lagi pada PDI; sedangkan sebagian dari pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1977 memberikan suara mereka pada pilihan Tak-sah/Hangus ternyata bergoyang dari pilihannya itu sehingga tampaknya menguntungkan Golkar, atau PPP, atau PDI;
- k. Di daerah pemilihan Jawa Tengah, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung mempunyai pola memilih pertama-tama pada pilihan Tak-sah/Hangus, dan kemudian dalam proporsi yang lebih kecil pada Golkar, serta dalam proporsi yang jauh lebih kecil lagi pada PPP; sedangkan sebagian dari para pemilih terdaftar lama yang dalam tahun 1971 memberikan suaranya pada PDI ternyata bergoyang dari pilihannya itu, sehingga tampaknya menguntungkan pilihan Tak-sah/Hangus atau Golkar atau PPP. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung mempunyai pola memilih pertama-tama pada Golkar, dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil pada PPP; sedangkan sebagian dari para pemilih lama yang pada tahun 1977 memberikan suara mereka pada PDI dan pilihan Tak-sah/Hangus, ternyata bergoyang dari pilihan-pilihannya itu, sehingga tampaknya menguntungkan Golkar atau PPP;
- l. Di daerah pemilihan DI Yogyakarta, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung mempunyai pola memilih pertama-tama pada PDI, kemudian dalam proporsi yang lebih kecil pada pilihan Tak-sah/Hangus, dan dalam proporsi yang lebih kecil lagi pada PPP, serta dalam proporsi yang jauh lebih kecil pada Golkar. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung mempunyai pola memilih pertama-tama pada Golkar, dan kemudian dalam proporsi yang lebih kecil pada pilihan Tak-sah/Hangus

tahun 1977 memberikan suaranya pada PDI, ternyata bergoyang dari pilihannya itu, sehingga tampaknya menguntungkan Golkar atau pilihan Tak-sah/Hangus ataupun PPP;

m. Di daerah pemilihan Jawa Timur, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung mempunyai pola memilih pertama-tama pada Golkar, dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil dan keduanya hampir seimbang pada PPP dan pada pilihan Tak-sah/Hangus, serta kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil pada PDI. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung mempunyai pola memilih pertama-tama pada pilihan Tak-sah/Hangus, dan kemudian berturut-turut dalam proporsi yang lebih kecil pada PPP, Golkar, dan PDI;

n. Di daerah pemilihan Kalimantan Barat, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar, dan kemudian dalam proporsi yang lebih kecil pada PPP, serta selanjutnya dalam proporsi yang lebih kecil lagi pada pilihan Tak-sah/Hangus; sedangkan sebagian dari para pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1971 memberikan pilihan pada PDI ternyata bergoyang dari pilihannya itu, sehingga tampaknya menguntungkan Golkar atau PPP atau pilihan Tak-sah/Hangus. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung mempunyai pola memilih pertama-tama pada Golkar, dan kemudian dalam proporsi yang lebih kecil pada PPP dan pada pilihan Tak-sah/Hangus, serta lebih lanjut dalam proporsi yang lebih kecil lagi pada PDI;

o. Di daerah pemilihan Kalimantan Tengah, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada PPP, kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil berturut-turut pada pilihan Tak-sah/Hangus, Golkar, dan PDI. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih terutama pada Golkar; sedangkan para pemilih terdaftar lama yang memberikan suaranya pada PPP, pilihan Tak-sah/Hangus, dan pada PDI, ternyata terdapat sebagian yang bergoyang dari pilihannya itu sehingga menguntungkan Golkar;

p. Di daerah pemilihan Kalimantan Selatan, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada PPP, dan kemudian dalam proporsi yang lebih kecil pada pilihan Tak-sah/Hangus; sedangkan sebagian dari para pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1971 memberikan suaranya pada Golkar dan pada PDI, ternyata bergoyang dari pilihan-pilihannya itu, sehingga menguntungkan PPP dan pilihan Tak-sah/Hangus. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih terutama pada Golkar, dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil pada PPP dan pada PDI; sedangkan sebagian dari

pilihan Tak-sah/Hangus, ternyata bergoyang dari pilihannya itu, sehingga menguntungkan Golkar atau PPP atau PDI;

q. Di daerah pemilihan Kalimantan Timur, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar, kemudian dalam proporsi yang sedikit lebih kecil pada pilihan Tak-sah/Hangus dan pada PPP; sedangkan sebagian dari para pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1971 memberikan suaranya pada PDI, ternyata kemudian bergoyang dari pilihannya itu, sehingga menguntungkan Golkar atau pilihan Tak-sah/Hangus atau PPP. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar, dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil pada PPP dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil lagi pada PDI dan pilihan Tak-sah/Hangus;

r. Di daerah pemilihan Sulawesi Utara, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil pada pilihan Tak-sah/Hangus; sedangkan sebagian dari pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1971 memberikan suaranya pada PDI dan PPP, ternyata bergoyang dari pilihan-pilihannya itu, sehingga tampaknya menguntungkan Golkar atau pilihan Tak-sah/Hangus. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih pada Golkar; sedangkan sebagian dari para pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1977 memberikan suaranya pada PPP, pada pilihan Tak-sah/Hangus, dan pada PDI, ternyata bergoyang dari pilihan-pilihannya itu, sehingga menguntungkan Golkar;

s. Di daerah pemilihan Sulawesi Tengah, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar, dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil berturut-turut pada pilihan Tak-sah/Hangus dan pada PPP; sedangkan sebagian dari para pemilih lama yang pada tahun 1971 memberikan suaranya pada PDI, ternyata bergoyang dari pilihannya itu, sehingga menguntungkan Golkar, atau pilihan Tak-sah/Hangus, atau PPP. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar, dan kemudian pada proporsi yang jauh lebih kecil pada PDI dan PPP; sedangkan sebagian dari pemilih terdaftar yang lama dan pada tahun 1977 memberikan suaranya pada pilihan Tak-sah/Hangus, ternyata bergoyang dari pilihannya itu, sehingga menguntungkan Golkar atau PDI atau PPP;

t. Di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih terutama pada Golkar; sedangkan sebagian dari para pemilih terdaftar lama yang memberikan suaranya pada PPP dan PDI, ternyata bergoyang dari pilihan-pilihannya

tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih terutama pada Golkar; sedangkan sebagian dari para pemilih terdaftar lama yang memberikan suaranya pada PPP dan PDI, ternyata bergoyang dari pilihan-pilihannya, sehingga menguntungkan Golkar;

u. Di daerah pemilihan Sulawesi Selatan, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil pada pilihan Tak-sah/Hangus; sedangkan sebagian dari para pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1971 memberikan suaranya pada PPP dan PDI, ternyata bergoyang dari pilihan-pilihannya itu, sehingga menguntungkan Golkar dan/atau pilihan Tak-sah/Hangus. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar, dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil pada pilihan Tak-sah/Hangus; sedangkan sebagian dari para pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1977 memberikan suaranya pada PPP dan PDI, ternyata bergoyang dari pilihan-pilihannya itu, sehingga menguntungkan Golkar dan atau pilihan Tak-sah/Hangus;

v. Di daerah pemilihan Bali, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar, dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil pada pilihan Tak-sah/Hangus; sedangkan sebagian dari para pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1971 memberikan suaranya pada PDI dan PPP, ternyata bergoyang dari pilihan-pilihannya itu, sehingga menguntungkan Golkar atau pilihan Tak-sah/Hangus. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar, dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil pada PPP; sedangkan para pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1977 memberikan suaranya pada pilihan Tak-sah/Hangus dan pada PDI, ternyata bergoyang dari pilihan-pilihannya itu, sehingga menguntungkan Golkar dan/atau PPP;

w. Di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada pilihan Tak-sah/Hangus, dan kemudian dalam proporsi yang sedikit lebih kecil pada PPP, serta selanjutnya dalam proporsi yang jauh lebih kecil pada PDI; sedangkan sebagian dari para pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1971 memberikan suaranya pada Golkar, ternyata bergoyang dari pilihannya itu, sehingga menguntungkan pilihan Tak-sah/Hangus atau PPP atau PDI. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih terutama pada Golkar; sedangkan para pemilih terdaftar lama yang memberikan pilihan-pilihannya pada pilihan Tak-sah/Hangus, pada PPP, dan pada PDI, ternyata bergoyang dari pilihan-pilihannya itu, sehingga menguntungkan Golkar.

- x. Di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar dan dalam proporsi yang jauh lebih kecil pada pilihan Tak-sah/Hangus; sedangkan sebagian dari para pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1971 memberikan suaranya pada PDI dan PPP, ternyata bergoyang dari pilihan-pilihannya itu, sehingga menguntungkan Golkar dan/atau pilihan Tak-sah/Hangus. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih terutama pada Golkar; sedangkan para pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1977 memberikan suaranya pada PDI, pilihan Tak-sah/Hangus, dan pada PPP, ternyata bergoyang dari pilihan-pilihannya itu, sehingga menguntungkan Golkar;
- y. Di daerah pemilihan Maluku, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil pada pilihan Tak-sah/Hangus; sedangkan sebagian dari para pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1971 memberikan suaranya pada PDI dan pada PPP, ternyata bergoyang dari pilihan-pilihannya itu, sehingga menguntungkan Golkar dan/atau pilihan Tak-sah/Hangus. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar, dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil pada PPP dan selanjutnya dalam proporsi yang lebih kecil lagi pada pilihan Tak-sah/Hangus; sedangkan sebagian dari para pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1977 memberikan suaranya pada PDI, ternyata bergoyang dari pilihannya itu, sehingga menguntungkan Golkar dan/atau PPP dan/atau pilihan Tak-sah/Hangus;
- z. Untuk seluruh Indonesia, di luar Irian Jaya dan Timor Timur, para pemilih terdaftar baru pada tahun 1977 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar, kemudian dalam proporsi yang sedikit lebih kecil pada PPP, dan selanjutnya dalam proporsi yang lebih kecil lagi pada pilihan Tak-sah/Hangus; sedangkan sebagian dari para pemilih terdaftar lama yang pada tahun 1971 memberikan suaranya pada PDI, ternyata bergoyang dari pilihannya itu, sehingga menguntungkan Golkar dan/atau PPP dan/atau pilihan Tak-sah/Hangus. Para pemilih terdaftar baru pada tahun 1982 cenderung memiliki pola memilih pertama-tama pada Golkar, dan kemudian dalam proporsi yang jauh lebih kecil pada PPP, serta selanjutnya dalam proporsi yang jauh lebih kecil lagi berturut-turut pada PDI dan pada pilihan Tak-sah/Hangus.

Apabila angka-angka yang terdapat dalam Tabel 6 dilihat secara relatif dengan angka-angka yang terdapat dalam Lampiran II, maka akan ternyata hal-hal berikut:

1. Antara tahun 1971 dan tahun 1977, PPP mendapatkan peningkatan yang

Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan antara tahun 1977 dan tahun 1982, PPP mendapatkan peningkatan yang berarti di daerah-daerah pemilihan: DI Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan demikian terdapat petunjuk bahwa pola memilih dari para pemilih terdaftar baru terus-menerus menguntungkan PPP di daerah-daerah pemilihan: DI Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan DKI Jakarta;

2. Antara tahun 1971 dan tahun 1977, Golkar mendapatkan peningkatan yang berarti di daerah-daerah pemilihan: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Sedangkan antara tahun 1977 dan tahun 1982, Golkar mendapatkan peningkatan yang berarti di semua daerah pemilihan, kecuali di daerah-daerah pemilihan: DI Aceh, Sumatera Barat dan Jawa Timur. Dengan demikian terdapat petunjuk bahwa pola memilih dari para pemilih terdaftar terus-menerus menguntungkan Golkar di daerah-daerah pemilihan: Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku;
3. Antara tahun 1971 dan tahun 1977, PDI mendapatkan peningkatan yang berarti di daerah pemilihan DI Yogyakarta; sedangkan antara tahun 1977 dan tahun 1982, PDI mendapatkan peningkatan yang berarti di daerah pemilihan Jawa Barat.

### DAMPAK PARTAI LAMA YANG BERFUSI DAN CIRI KHAS KEAGAMAAN

Masalah dampak partai lama yang kemudian berfusi dan ciri khas keagamaan terhadap pola memilih masyarakat, dapat dipecah menjadi dua persoalan. Pertama, apakah partai-partai yang masing-masing menjadi peserta dalam Pemilihan Umum tahun 1971 dan kemudian berfusi dalam PDI masih memperlihatkan pengaruhnya terhadap pola memilih masyarakat? Kedua, apakah partai-partai yang masing-masing menjadi peserta dalam Pemilihan Umum Tahun 1971 dan kemudian berfusi dalam PPP masih memperlihatkan pengaruhnya terhadap pola memilih masyarakat? Persoalan kedua ini dapat diajukan dengan kata lain, yaitu: apakah ciri khas keagamaan dalam PPP



Partai-partai yang kemudian berfusi ke dalam PDI terdiri dari: Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Murba, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Dalam Pemilihan Umum tahun 1971, bagian yang berarti dari Partai Katolik ke dalam PDI adalah dari daerah-daerah pemilihan Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur; bagian yang berarti dari Parkindo ke dalam PDI adalah dari daerah-daerah pemilihan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Maluku; bagian yang berarti dari PNI ke dalam PDI adalah dari daerah-daerah pemilihan Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali; sedangkan dari Partai Murba dan IPKI tidak terdapat bagian yang berarti ke dalam PDI.

Dari Tabel 6 ternyata bahwa antara tahun 1971 dan tahun 1977, PDI mengalami kenaikan di daerah pemilihan Sumatera Utara, DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Jawa Timur; tetapi mengalami penurunan di daerah-daerah pemilihan Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Demikian pula antara tahun 1977 dan tahun 1982, PDI mengalami kenaikan di daerah-daerah pemilihan DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah; tetapi mengalami penurunan di daerah-daerah pemilihan Sumatera Utara, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Dengan demikian kiranya dapat dikatakan bahwa pengaruh dari partai-partai lama di dalam PDI yang tampaknya masih ada terhadap pola memilih masyarakat dari daerah-daerah pemilihan DKI Jakarta dan Jawa Timur; sedangkan di daerah-daerah pemilihan yang lain pengaruh partai-partai lama yang berfusi dalam PDI terhadap pola memilih masyarakat tampaknya telah menghilang.

Partai-partai yang kemudian berfusi ke dalam PPP terdiri dari: Partai Syariat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PI Perti). Untuk menduga adanya dampak ciri khas keagamaan terhadap pola memilih masyarakat dibuat Tabel 7.

Dari Tabel 7 dapat dikemukakan bahwa pada tahun 1971 dampak ciri khas keagamaan terhadap pola memilih masyarakat terdapat di daerah-daerah pemilihan: DI Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Pada tahun 1977 dampak ciri khas keagamaan terhadap pola memilih masyarakat terdapat di daerah-daerah pemilihan: DI Aceh, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan pada tahun 1982 dampak ciri khas keagamaan terhadap pola memilih masyarakat terdapat di daerah-daerah

DAMPAK CIRI KHAS KEAGAMAAN TERHADAP POLA MEMILIH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM\*

Daerah Pemilihan	1971			1977			1982		
	(A)	(B)	(C = A-B)	(A)	(B)	(C = A-B)	(A)	(B)	(C = A-B)
DI Aceh	46,05	24,08	+21,97	52,52	19,60	+32,92	54,75	18,96	+35,79
Sumatera Utara	14,78	39,32	-24,54	20,50	35,89	-15,39	19,08	37,13	-18,05
Sumatera Barat	31,68	30,03	+1,65	28,87	30,05	-1,18	34,07	26,91	+7,16
Riau	19,24	37,17	-17,93	29,86	29,08	+0,78	23,86	34,33	-10,47
Sumatera Selatan	27,35	31,83	-4,48	36,31	24,44	+11,87	34,29	27,91	+6,38
Jambi	9,81	42,24	-32,43	14,84	39,96	-25,12	13,39	41,79	-28,40
Bengkulu	14,65	40,08	-25,43	20,27	36,23	-15,96	23,47	33,15	-9,68
Lampung	21,10	37,30	-16,20	28,82	32,40	-3,58	27,37	31,90	-4,53
Jawa Barat	19,74	37,89	-18,15	26,72	33,46	-6,74	24,57	32,94	-8,37
DKI Jakarta	30,67	28,67	+2,00	38,46	25,01	+13,45	36,04	27,95	+8,09
Jawa Tengah	26,81	33,25	-6,44	23,77	30,15	-6,38	25,25	32,92	-7,67
DI Yogyakarta	20,01	36,58	-16,57	20,75	34,29	-13,54	20,58	33,78	-13,20
Jawa Timur	36,82	28,49	+8,33	33,39	29,62	+3,77	32,93	28,48	+4,45
Kalimantan Barat	17,64	38,27	-20,63	20,36	36,46	-16,10	10,11	36,53	-26,42
Kalimantan Tengah	15,73	40,08	-24,35	24,93	34,33	-9,40	14,39	42,26	-27,87
Kalimantan Selatan	31,63	30,78	+0,85	42,66	21,84	+20,82	36,99	28,16	+8,83
Kalimantan Timur	27,56	31,97	-4,41	29,29	26,71	+2,58	27,28	29,19	-1,91
Sulawesi Utara	22,06	37,12	-15,06	16,61	38,83	-22,22	6,56	45,23	-38,67
Sulawesi Tengah	18,22	38,92	-20,70	17,93	37,53	-19,60	15,19	41,38	-26,19
Sulawesi Tenggara	5,72	46,56	-40,84	3,13	48,49	-45,36	2,60	49,46	-46,86
Sulawesi Selatan	18,07	39,06	-20,99	13,43	41,22	-27,79	9,80	43,01	-33,21
Bali	2,00	46,40	-44,40	1,48	44,25	-42,77	1,83	46,31	-44,48
Nusa Tenggara Barat	23,42	35,62	-12,20	30,65	26,51	+4,14	25,52	32,56	-7,04
Nusa Tenggara Timur	3,06	47,28	-44,22	1,89	47,57	-45,68	1,27	48,50	-47,23
Maluku	23,83	35,88	-12,05	17,99	38,28	-20,29	17,98	38,41	-20,43

DI luar Irian Jaya dan Timor Timur; diolah dari Tabel 5.

(A) = Proporsi PPP dari pemilih terdaftar; (B) = 1/2 x (Proporsi Golkar + Proporsi PDI dari pemilih terdaftar); (C) = (A) - (B).

Timur dan Kalimantan Selatan. Dengan demikian ternyata bahwa dampak ciri khas keagamaan terhadap pola memilih masyarakat secara berturut-turut dalam tiga kali pemilihan umum terdapat di daerah-daerah pemilihan: DI Aceh, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

### CATATAN PENUTUP

Tiga kali pemilihan umum dalam periode Orde Baru yang berlangsung secara periodik ternyata memperlihatkan ciri khas dari pola memilih masyarakat Indonesia, di luar Irian Jaya dan Timor Timur. Dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas kiranya ternyata bahwa dalam pola memilih masyarakat Indonesia terdapat banyak goyangan antara pola memilih dalam pemilihan umum yang terdahulu dengan pola memilih dalam pemilihan umum yang selanjutnya; tampaknya pola memilih dari para pemilih baru memiliki ciri tersendiri yang mungkin sekali dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masa antara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum berikutnya. Selain itu dapat dikemukakan pula bahwa ciri khas keagamaan dan ciri yang dimiliki oleh partai-partai yang lama tampaknya tidak berpengaruh positif dan berarti baik bagi PDI, kecuali bagi PDI di daerah pemilihan DKI Jakarta dan Jawa Timur, maupun bagi PPP, kecuali bagi PPP secara terus-menerus di daerah-daerah pemilihan DI Aceh, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

Beberapa hal yang dialami dengan meraba-raba hasil-hasil pemilihan umum tahun 1971, 1977 dan 1982 tersebut justru menjadi berarti pada saat ini. Karena dalam bulan Maret 1983 ini berlangsunglah Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang antara lain akan membahas permasalahan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi kekuatan sosial-politik atau partai politik serta asas keterbukaan dalam keanggotaannya masing-masing.

## Lampiran I

**POLA KEMUNGKINAN PILIHAN PEMILIH TERDAFTAR  
DALAM DUA PEMILIHAN UMUM YANG BERTURUT-TURUT**

Proporsi Dalam Pemilihan Umum Selanjutnya	Proporsi Dalam Pemilihan Umum Terdahulu				Pemilih Terdaftar Baru
	P <sub>1</sub>	G <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	
P <sub>2</sub>	a	e	i	m	q
G <sub>2</sub>	b	f	j	n	r
D <sub>2</sub>	c	g	k	o	s
H <sub>2</sub>	d	h	l	p	t

**Keterangan:**  $(P_1 + G_1 + D_1 + H_1) = 100\%$ ;  $(P_2 + G_2 + D_2 + H_2) = 100\%$ ;

$$P_1 = (a + b + c + d);$$

$$P_2 = (a + e + i + m + q);$$

$$G_1 = (e + f + g + h);$$

$$G_2 = (b + f + j + n + r) \text{ dst.}$$

Dalam pemilihan umum yang terdahulu:

$$(a + b + c + \dots + m + n + o + p) = 100\%.$$

Dalam pemilihan umum yang selanjutnya:

$$(a + b + c + \dots + p + q + r + s + t) = 100\%.$$

P = pilihan pada PPP; G = pilihan pada Golkar; D = pilihan pada PDI; dan

H = pilihan pada suara Tak-sah/Hangus (sengaja/tidak).

Pemilih terdaftar yang baru terhadap pemilih terdaftar yang lama dalam pemilihan umum yang terdahulu =  $(q + r + s + t)\%$

Anggapan yang diambil adalah sebagai berikut:

Seluruh P<sub>1</sub>, G<sub>1</sub>, D<sub>1</sub>, H<sub>1</sub> tetap terhimpun menjadi (a), (f), (k), (p) yang masing-masing menjadi sebagian dari P<sub>2</sub>, G<sub>2</sub>, D<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>.

Dengan demikian dianggap bahwa:

$$P_2 = (a + q); G_2 = (f + r); D_2 = (k + s); H_2 = (p + t)$$

dan

$$(e + i + m) = (b + c + d); (b + j + n) = (e + g + h);$$

$$(i + j + l) = (c + g + o); (m + n + o) = (d + h + l).$$

## Lampiran II

**TAMBAHAN PEMILIH TERDAFTAR (%)  
TERHADAP PEMILIH TERDAFTAR SEBELUMNYA\***

Daerah Pemilihan	(a)	(b)	(c)
1. DI Aceh	18,34	15,62	18,48
2. Sumatera Utara	26,38	21,89	27,66
3. Sumatera Barat	21,44	13,43	16,31
4. Riau	26,09	28,09	35,42
5. Sumatera Selatan	26,39	25,74	29,53
6. Jambi	28,76	24,40	31,42
7. Bengkulu	24,93	37,43	46,76
8. Lampung	44,08	32,58	46,94
9. Jawa Barat	21,78	17,50	21,31
10. DKI Jakarta	26,99	27,89	35,42
11. Jawa Tengah	17,65	11,20	13,18
12. DI Yogyakarta	17,59	11,50	13,52
13. Jawa Timur	17,91	11,12	13,11
14. Kalimantan Barat	21,84	27,18	33,12
15. Kalimantan Tengah	23,51	24,43	30,17
16. Kalimantan Selatan	14,53	17,78	20,36
17. Kalimantan Timur	54,45	21,03	32,48
18. Sulawesi Utara	22,80	16,65	20,45
19. Sulawesi Tengah	29,33	20,08	25,97
20. Sulawesi Tenggara	18,29	20,13	23,81
21. Sulawesi Selatan	11,48	17,39	19,39
22. Bali	18,01	10,50	12,39
23. Nusa Tenggara Barat	16,54	12,05	14,04
24. Nusa Tenggara Timur	14,66	11,05	12,67
25. Maluku	20,38	16,44	19,79
<b>Total</b>	<b>20,51</b>	<b>17,21</b>	<b>20,74</b>

\* Di luar Irian Jaya dan Timor Timur.

$$(a) = \frac{1977-1971}{1971}; \quad (b) = \frac{1982-1977}{1977}; \quad (c) = \frac{1982-1977}{1971}$$